

## PBB DI TENGAH ARUS DEMOKRATISASI



*Mufid*

United Nation Organization (UNO) is world institution consists of a great number of countries. Its existence must be considered proportionally in order to get a better image of its role. After solving "several" world affairs, it will be challenged to solve many mondial problems. UNO consists of developed and developing countries. When the developed countries tend to dominate and manipulate the role of its existence, it is important to consider the pillars of democracy as the best way to reach an ideal world balance.

**T**anggal 24 Oktober 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berusia 48 tahun. Organisasi ini secara obyektif telah diakui sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia di bumi. Eksistensinya tetap dibutuhkan mayoritas penduduk dunia yang mencitakan kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. Memenuhi harapan itu, PBB sebenarnya memikul tanggungjawab yang tidak ringan. Karena beranggotakan negara-negara yang memiliki kepentingan beragam, ia dituntut mampu memenuhi semua aspirasi mereka secara berimbang. Namun, posisi ideal itu tidak selalu terpenuhi karena perbenturan kepentingan yang begitu deras dan keras. Sebagai media yang berupaya menampung permasalahan manusia, ia memiliki kekuatan tapi juga kelemahan.

Sejak berdiri pada 1945, eksistensi PBB tidak selalu dipahami secara tepat, sejalan dengan kondisi obyektifnya. Hingga kini, masih terdapat anggapan bahwa PBB adalah sebuah pemerintahan dunia yang memiliki "kesaktian" dan kekuatan "gaib". Anggapan ini biasanya ditandai dengan harapan kepada organisasi itu sebagai juru selamat yang mampu menyelesaikan setiap persoalan, dengan sekali gebrakan. Padahal, banyak kasus yang melibatkan pertikaian regional maupun internasional yang terus menumpuk dan semakin sulit dipecahkan. Kemelut berkepanjangan di Timur Tengah dan persoalan yang semakin rumit di bekas negara Yugoslavia merupakan contoh kasus-kasus yang sulit dipecahkan PBB.

Pada dasarnya, PBB merujuk kepada prinsip persamaan kedaulatan semua anggotanya. Setiap negara anggota memiliki tanggungjawab terhadap masalah dalam negeri masing-masing. Dalam kontes ini, PBB tidak berhak mendiktekan kebijakan kepada negara-negara tersebut. PBB tidak berhak campur tangan dalam perumusan kebijakan internal suatu negara. Organisasi ini lebih berperan aktif menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan komunikasi dan interaksi antar negara. Masalah-

masalah itu sering disebut sebagai masalah internasional. Dengan kata lain, PBB ibarat pusat perpaduan tindakan negara-negara di dunia untuk mencapai tujuan bersama dalam menata bumi yang relatif lebih damai dan sentosa.

Kekuatan PBB terletak pada eksistensinya sebagai organisasi bangsa-bangsa yang memiliki latar sejarah. Ia memiliki posisi sebagai alat yang telah lama mengukuhkan eksistensinya melalui prosedur yang disepakati segenap anggotanya. PBB juga memiliki kekuatan karena telah teruji oleh arus zaman dalam pergumulan

berbagai pengalaman. Organisasi ini memiliki posisi strategis untuk menciptakan harmonisasi kebijakan negara-negara anggota dalam upaya merengkuh tujuan mereka. Sebagai organisasi, ia juga terbuka bagi setiap negara di dunia yang menginginkan bergabung dan meneruskan aspirasinya. Namun, PBB tak terhindar dari kelemahan karena ia tergantung kepada setiap negara anggota untuk menentukan tujuan organisasi ini didirikan. Kelemahan lain organisasi ini terletak pada keragaman anggotanya se-

cara kultural, sosiologis, ekonomis dan politis. Keragaman kepentingan itu tak jarang menggiring PBB pada berbagai momentum yang tak menguntungkan. Perbedaan yang acap mencuat antara kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara maju, misalnya, merupakan fenomena menarik yang dapat mereduksi posisi dan peran idealnya sebagai media mereka menggayuh tujuan bersama.

### **PBB pasca Perang Dingin**

Secara fisik, politis dan ekonomis, manusia berada di atas bumi yang sama. Mereka berada dalam posisi saling membutuhkan dan bergantung. Tak ada satu negara pun, termasuk negara adikuasa seperti AS yang secara congkak dapat menyombongkan diri tak tergantung pada negara lain. Sikap-sikap sombong dalam percaturan internasional yang terlanjur mencuat ke permukaan lebih disebabkan oleh eksistensinya sebagai super power. Namun, ia tetap

**Sikap-sikap  
sombong dalam  
percaturan  
internasional yang  
terlanjur mencuat  
ke permukaan  
lebih disebabkan  
oleh eksistensi AS  
sebagai super  
power**

memiliki ketergantungan pada negara-negara lain dalam menata suasana politik dan ekonomi. Posisinya sebagai adikuasa juga tertopang oleh komunikasi dan interaksi internasionalnya karena sebutan super power berasal dari negara-negara lain yang secara riil memang kalah kuat ketimbang negara itu.

Situasi dunia yang saling tergantung itu kini masih diwarnai berbagai problema yang membutuhkan uluran tangan PBB. Perang, rasialisme, kolonialisme, kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi merupakan agenda problema yang menuntut peran aktif organisasi ini. Realitas yang nyaris mendominasi kehidupan manusia itu memerlukan kehadiran PBB sebagai satu-satunya organisasi yang secara aspiratif mewakili bagian terbesar penduduk dunia. Dalam usia ke 48, PBB telah meniti aneka ragam periode yang sarat dengan pergumulan dan perubahan. Jangkauan dan akumulasi tugas dan tanggungjawabnya nyaris tak terhitung. Organisasi ini juga dinilai telah mencapai tingkat kebutuhan dan kedudukan yang jauh lebih besar ketimbang perkiraan pendirinya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui perlunya diplomasi bilateral dan regional dan selalu mendorong perkembangan positif yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan negara-negara yang terlibat dalam perjanjian itu. Namun, sejarah mencatat bahwa hubungan antar negara tidak cukup. Berbagai ragam perjanjian regional semata juga tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Cepat atau lambat penduduk dunia membutuhkan keterlibatan dan proses pengertian global. Dalam konteks inilah PBB tampil sebagai media strategis yang mampu menampung setiap aspirasi masing-masing negara. PBB juga terus berjuang menegakkan eksistensinya sebagai institusi yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan regional secara politis, ekonomis, edukatif dan kultural.

Menghadapi sekian problema itu, dewasa ini PBB memperoleh dukungan internal maupun eksternal yang relatif lebih kondusif. Sejak Perang Dingin usai dan ditandai dengan runtuhnya Uni Sovyet, terbuka lebar kesempatan manusia untuk berharap bahwa aneka ragam

perubahan yang terjadi dalam kawasan politik dan ekonomi melahirkan optimisme baru dalam upaya mereka menciptakan kondisi-kondisi yang lebih menguntungkan. Setelah sekian dekade manusia terbelenggu kekhawatiran perang Nuklir yang dimotori AS dan Uni Sovyet, kini orientasi mereka lebih tertuju kepada perang melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Selain membuka berbagai kemungkinan perlucutan senjata, berakhirnya Perang Dingin juga membuka harapan manusia untuk melakukan reformasi ekonomi dan demokrasi. Jika idealita ini tercapai, umat manusia akan memiliki kans lebih besar memenuhi kebutuhan-kebutuhan fundamental mereka seperti rasa aman dan tenang serta kesejahteraan lahir batin.

Perang Dingin yang berakhir telah memungkinkan pengurangan pendayagunaan yang tak perlu terhadap berbagai sumber daya alam yang mencakup fisik, keuangan, ilmu dan manajemen. Ketika Amerika Serikat dan Uni Sovyet masih bersitegang panjang dalam perang urat saraf, aneka ragam sumber daya itu tersedot untuk keperluan perang dan kebutuhan militer. Kini, sumber daya alam dan manusia itu lebih diharapkan terdayagunakan untuk memecahkan berbagai masalah sosial di berbagai negara industri maupun berkembang. Anugerah Tuhan yang tersebar di berbagai sudut bumi itu juga mungkin lebih diprioritaskan untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan, investasi jangka panjang yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan serta mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Masalahnya, harapan yang menggantung itu kini masih berupa potensi yang perlu diaktualisasikan oleh setiap anggota PBB. Di negara-negara industri, misalnya, pengeluaran untuk militer sebagian besar menahan gejolak geopolitis yang telah terjadi. Menurut Laporan UNICEF (1993), secara keseluruhan, anggaran militer per tahun negara-negara industri maju berjumlah sekitar 750 milyar dollar AS, sama dengan gabungan penghasilan tahunan separuh penduduk bumi yang paling miskin. Amerika Serikat, misalnya, mengeluarkan sekitar 50 persen setiap hari untuk keperluan pertahanan dibanding dana yang dianggarkan satu dasawarsa

yang lalu. Pengeluaran yang direncanakan, dalam program pertahanan lima tahun yang diserahkan kepada Kongres dalam bulan Januari 1992, menggambarkan penurunan yang berangsur sehingga pada tahun 1996 pengeluaran itu akan tetap 25 persen lebih tinggi, jika diukur dengan kurs dollar yang konstan, dibanding pada masa Richard Nixon dan Leonid Brezhnev. Demikian juga, di Eropa Barat yang mengalami perubahan situasi militer dan politik dalam lima tahun terakhir, berkembang gagasan yang kian marak tentang pengurangan anggaran pertahanan, namun tidak terlihat penurunan dalam tingkat pengeluaran untuk keperluan militer.

Di negara-negara berkembang, pengurangan anggaran militer sejak tahun 1984 sampai 1990 telah meningkat sekitar 20 persen. Namun, angka-angka itu tak lebih dari sekedar janji tanpa bukti empiris. Beberapa negeri di kawasan Timur Tengah memang melakukan pengurangan itu. Namun, di kawasan lain, tidak terdapat pengurangan kongkrit. Kalaupun terjadi, pengurangan itu dilakukan sebagai akibat dari kewajiban untuk membayar hutang, bukan karena komitmen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Betapapun, ada indikasi positif yang lebih mengundang harapan bagi tercapainya proses perdamaian di kawasan ini. Ethiopia, misalnya, telah melakukan demobilisasi militer. Anggaran militer yang semula 60 persen kini turun menjadi sekitar 30 persen, sementara anggaran kesehatan dan pendidikan meningkat dari 12 persen pada 1989/1990 menjadi hampir 20 persen pada tahun anggaran 1992/1993. Negeri ini juga merayakan ulang tahun pemerintahan yang baru dengan parade rakyat yang memamerkan simbol-simbol perdamaian seperti bendera dan hiasan burung dara putih sebagai lambang perdamaian. Mereka meninggalkan perayaan yang dihiasi parade militer.

### Arus Demokrasi

Pengalihan dana dari militer ke pembangunan pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan politik merupakan indikator positif yang membantu memecahkan masalah kemiskinan. Prioritas pembangunan yang tertuju pada lima kawasan itu juga mengundang harapan segar bagi pertumbuhan arus demokrasi di berbagai negara berkembang. Pertumbuhan arus demokrasi itu memang menjadi dambaan kebanyakan umat manusia karena kegetiran masa lalu dalam belenggu militerisasi yang berlebihan. Tanpa menepis arti penting peran militer dalam proses pembangunan negara, di kebanyakan negara berkembang, pernah muncul kecenderungan penguasa terjebak dalam perilaku pemerintahan yang tiranik. Di antara negara-negara berkembang yang pernah terjebak dalam militerisasi dan tirani adalah Chad, Etiopia, Liberia, Mozambik, Somalia dan Uganda.

Anggaran militer di kawasan itu terbukti melonjak lima kali dalam tempo 30 tahun. Runtuhnya, kaum elit militer memerintah negara untuk kepentingan segelintir manusia, menggunakan senjata untuk membantai warga negara sendiri dan menindas hak mayoritas penduduk. Rakyat pun diperas, harus membayar biaya untuk kepentingan militer. Menurut catatan UNICEF dalam *Effects of Armed Conflict on Women and Children: Relief and Rehabilitation in War Situation (1992)*, dalam dasawarsa terakhir, lebih dari 1,5 juta anak terbunuh dalam berbagai peperangan dan friksi internal, lebih dari 4 juta mengalami cacat fisik, lebih dari 5 juta penduduk hidup di berbagai kamp pengungsi dan lebih dari 12 juta kehilangan tempat tinggal. Sistem pemerintahan militer yang diktator itu juga mengakibatkan kehancuran pangan, jalan, pasar, sekolah dan klinik. Kebebasan rakyat sipil hancur bersama harapan jutaan orang untuk dapat mengenyam hidup layak.

**Pertumbuhan arus demokrasi itu memang menjadi dambaan kebanyakan umat manusia karena kegetiran masa lalu dalam belenggu militerisasi yang berlebihan.**

Berakhirnya Perang Dingin membawa harapan baru bagi umat manusia untuk menata kehidupan secara lebih demokratis. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat lebih dari sepertiga dari negara di dunia yang mengubah haluan ke arah pembangunan politik yang merujuk ke asas demokrasi. Fenomena ini menarik jika dikaji dalam konteks kehidupan masa depan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Semakin bermunculan prestasi manusia dalam menata demokrasi, semakin terbuka lebar kemungkinan dan kesempatan lapisan masyarakat miskin untuk memberdayakan diri mereka di lingkungan pendidikan, kebudayaan dan ekonomi. Rakyat yang semakin memiliki bekal dalam partisipasi aktif membangun negara itu menunjukkan indikator proses demokratisasi yang kian membumi. Artinya, jika demokrasi diterjemahkan sebagai aktualisasi peran serta dan aspirasi rakyat, proses pemberdayaan mereka dalam kawasan pendidikan, ekonomi dan kebudayaan merupakan keharusan sejarah yang dipikul oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks inilah, kiranya bangsa Indonesia relatif berhasil memadukan peran harmonis antara ABRI dan Sipil. Seperti banyak dikutip berbagai surat kabar, di depan peserta Kursus Reguler Angkatan XXVI Lemhannas, Presiden Soeharto telah mengemukakan pidato penting yang akan membantu proses pencarian format kepemimpinan bangsa di masa depan. Presiden meminta agar Lemhannas bersama seluruh korps alumninya secara khusus merumuskan bagaimana hubungan fungsional antara komando ABRI, instansi pemerintah dan kepemimpinan masyarakat pada tiap tingkat, baik dalam masa damai maupun darurat. Seluruh rumusan itu hendaknya diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam strategi nasional.

Selain ABRI, rakyat telah semakin cerdas dan terorganisasi dalam berbagai orsospol dan ormas. Kualitas kepemimpinannya juga meningkat. Perubahan di berbagai kalangan ini akan mempunyai pengaruh terhadap hubungan ABRI dan rakyat. Menurut Presiden, dalam masa damai hubungan itu harus mampu mendorong lajunya pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam masa

darurat, hubungan tadi harus memungkinkan semua pihak mengerahkan kekuatan yang dimiliki untuk menangkal serta menanggulangi berbagai wujud ancaman. Peralihan tanggungjawab kepemimpinan dari keadaan damai ke keadaan darurat dan sebaliknya harus dapat berlangsung tanpa guncangan (*Pelita*, 29 September 1993). Hubungan fungsional antara komando ABRI, instansi pemerintah dan kepemimpinan masyarakat memang penting untuk diletakkan dalam perspektif perkembangan Indonesia ke depan. Hubungan harmonis komponen-komponen tersebut sangat menentukan berjalan tidaknya fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan sosial maupun arah pencapaian pembangunan negeri ini.

Dilihat dari keseluruhan persoalan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat, kepemimpinan bangsa ke depan harus terbangun dari proses *sharing power* yang terjadi di antara berbagai komponen bangsa. Tuntutan ini antara lain tertopang oleh realitas, bahwa kemajuan ekonomi relatif telah mendorong pertumbuhan berbagai perubahan dalam masyarakat. Di antaranya adalah munculnya kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang secara kualitatif jauh lebih maju dibanding sepuluh apalagi duapuluh lima tahun silam. Dalam konteks politik, sosial dan ekonomi, mereka merupakan *critical mass* yang memerlukan pertimbangan serius bagi proses pembangunan Indonesia. Jika idealitas ini tercapai dalam perumusan yang relatif ideal, tragedi militerisasi di negara-negara berkembang lain —seperti terungkap di muka— tak perlu dirisaukan dan tak bakal melanda Indonesia.

Sejarah pun mencatat, bahwa peran militer di negeri ini tidak menampakkan kecenderungan pada militerisasi seperti di Chad, Liberia dan lain-lain. Dalam upaya menata komunikasi internasional yang relatif harmonis, ABRI lebih berperan sebagai penjaga perdamaian, seperti yang dilakukan di Timur Tengah maupun Kamboja. Karenanya, citra mereka di mata internasional tidak saja dipujikan, tapi juga menjadi teladan. Masyarakat Kamboja mengelu-elukan kehadiran mereka sebagai pelindung, pahlawan sekaligus kawan yang simpatik. Peran serta yang dimainkan dalam negeri juga lebih

mengesankan sebagai stabilisator dan dinamisor pembangunan. Nyaris tidak terdapat jarak antara mereka dan masyarakat luas, karena salah satu prioritas program yang terancangkan dan menunjukkan hasil-hasil positif adalah ABRI Masuk Desa (AMD).

Berbagai peran ABRI di dalam maupun luar negeri mencerminkan arus demokratisasi yang terus membias ke berbagai kawasan sebagai konsekuensi logis dari perkembangan pembangunan itu sendiri. Kenyataan ini diperkuat oleh Amartya Sen (*Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, 1981) yang menegaskan bahwa pengukuhan struktur politik yang demokratis merupakan syarat fundamental bagi tercapainya tujuan pemenuhan kebutuhan manusia seperti tersedianya bahan makanan pokok yang memenuhi kriteria 4 sehat lima sempurna dan peningkatan gizi masyarakat. Kondisi itu juga lebih menjamin keberhasilan program pendidikan dan kesehatan masyarakat. Struktur politik yang demokratis amat berguna untuk menciptakan lingkungan di mana rakyat dan berbagai organisasi masyarakat dapat bekerja secara optimal demi menggapai cita perubahan sosial yang lebih positif. Dalam kaitan inilah, aksi masyarakat harus dilihat sebagai tindakan-tindakan yang secara mandiri berasal dari mereka, dan bukan hanya sebagai tindakan-tindakan negara untuk masyarakat. Pengentasan kemiskinan, misalnya, membutuhkan kerangka politik yang demokratis dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan kata lain, daya guna aksi masyarakat tidak hanya tergantung kepada perundang-undangan, namun juga pada kekuatan dan aktivitas yang demokratis.

Dalam skala global, arus demokrasi memperoleh dukungan dari globalisasi informasi yang tersebar melalui media massa cetak dan elektronika. Dampak terpenting yang dihasilkan globalisasi di bidang politik adalah semakin kuatnya keinginan bangsa-bangsa untuk menciptakan sistem politik yang demokratis. Nilai-nilai demokrasi yang semula tumbuh dan berkembang di Barat telah menjalar ke seluruh sudut bumi, terutama dalam rentang waktu abad ke 20. Komunikasi secara global terbukti mampu memberikan gambaran yang indah ten-

tang demokrasi di Barat dengan menyuguhkan berbagai kemajuan dalam kehidupan manusia. Akibat globalisasi informasi yang menyebarkan virus nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai lama yang mengakar pada absolutisme kian tergusur dan tersingkir (*W.J. Stankiewicz, Approaches to Democracy, Philosophy of Government at the Close of Twentieth Century*, 1980).

### PBB dan Organisasi Regional

Ketika berkunjung ke Jepang, pertengahan Pebruari 1993, Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Boutros Ghali memperoleh kehormatan menyampaikan orasinya di depan Himpunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Jepang mengenai kerjasama antara PBB dan organisasi regional. Tema orasi itu dianggap menarik karena mengingatkannya kepada salah satu bahan disertasi yang mengantarkannya memperoleh gelar Doktor dari Universitas Paris tahun 1949. Menurut Sekjen dari Mesir itu, PBB telah diminta oleh negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan transformasi di kawasan internasional yang semakin berlangsung cepat. Optimalisasi peran organisasi regional merupakan salah satu tekanan yang paling deras mendesak PBB.

Sebagai upaya desentralisasi, delegasi dan kerjasama dengan PBB, organisasi regional memiliki peran strategis dalam ikut serta menata perdamaian dunia. Setelah "terbekukan" selama satu dasawarsa, kini eksistensi organisasi regional dinilai mampu memainkan peran strategis dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. Tiga organisasi regional—Organisasi Persatuan Afrika (OAU), Liga Negara-Negara Arab dan Organisasi Konferensi Islam—bahu membahu dengan PBB berupaya menyelesaikan kemelut di Somalia. Dalam pertemuan yang berlangsung di Addis Ababa, awal Januari 1993, pemimpin berbagai elemen dan faksi di Somalia sepakat mengadakan konferensi rujuk nasional yang diprakarsai oleh PBB bekerjasama dengan OAU, Gerakan Non-blok dan Komite tetap Negara-Negara di Tanduk Afrika. Namun, prakarsa PBB itu kemudian terkesan "mentah" karena ulah AS yang berambisi menegakkan eksistensinya sebagai polisi dunia.

Berakhirnya kemelut di Nikaragua melibatkan prakarsa para pemimpin negeri ini disamping Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS). Ikut merumuskan proses perdamaian di kawasan Amerika Latin, PBB mengutus Dante Caputo yang bekerjasama dengan OAS dalam perjuangan mereka menegakkan prinsip hak asasi manusia di Haiti. Upaya perdamaian di bekas negara Yugoslavia juga tak terpisah dari peran serta PBB. Badan Dunia ini mengutus Cyrus Vance bekerjasama dengan utusan khusus Masyarakat Eropa, Lord Davin Owen, terus mencoba mencari penyelesaian masalah internal negeri yang makmur dan damai saat dipimpin Josef Bros Tito itu. Di kawasan Asia Tenggara, PBB bekerjasama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) meredakan konflik berkepanjangan di Kamboja. Proses perdamaian di negeri ini juga melibatkan Jepang yang diwakili Yasushi Akashi sebagai duta PBB.

Interaksi PBB dengan berbagai organisasi regional memang lebih ditujukan pada bentuk-bentuk koperasi yang harmonis. Tuntutan itu bertolak dari latar sejarah kehadiran PBB sebagai Badan Dunia yang berjuang menampung setiap aspirasi negara-negara anggotanya. Sebelum 1914, perimbangan kekuatan dunia lebih ditentukan oleh aliansi strategis yang membentuk sebagai jaringan organisasi dunia. Saat itu belum lahir satu negara pun di dunia yang berhak mengklaim sebagai adikuasa. Karena tidak berpijak pada prinsip-prinsip organisasi yang mapan, jaringan organisasi ini mudah goyah dan kehilangan orientasi bersama yang mengakar pada prinsip perimbangan aspirasi. Perang Dunia I pecah antara lain karena fundamen organisasi itu tidak kukuh. Pengalaman pahit ini kemudian menumbuhkan inspirasi pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang bertujuan merumuskan perimbangan kekuatan. Namun, kegagalan Liga ini mendorong beberapa pemimpin dunia menganjurkan kembali ke sistem keamanan atas dasar prinsip regionalisme.

Ketika delegasi dari 50 negara bertemu di San Fransisco, April 1945, dalam upaya menyusun Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu masalah yang menghangat dalam

pertemuan itu adalah keinginan dari beberapa pihak yang menghendaki kebebasan organisasi-organisasi regional dari segala keterikatan dengan Badan Dunia itu. Masih merebak perbedaan antara regionalisme dan internasionalisme yang sulit dipecahkan. Masalah yang mengancam Konferensi San Fransisco dan keutuhan PBB ini menghasilkan kompromi yang kurang menggembirakan, yakni pasal 51 Piagam PBB yang mengakui hak pertahanan diri secara kolektif sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Demikian juga, pasal 52 yang menegaskan pengakuan terhadap eksistensi organisasi regional dengan catatan aktivitas mereka sejalan dan konsisten dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet masih terlibat dalam Perang Dingin, berbagai kebijakan PBB diwarnai dengan "perang" hak veto yang menepis setiap kemungkinan tercapainya sistem keamanan dan perdamaian kolektif. Karenanya, bertumbuhan organisasi regional sebagai kompensasi terhadap kerapuhan sistem kolektif. Perang Dingin juga melumpuhkan eksistensi PBB untuk berperan secara utuh dan optimal karena organisasi regional memiliki berbagai kemungkinan menyelesaikan pertikaian dan merumuskan keamanan yang bertentangan dengan Piagam PBB. Setelah Perang Dingin berakhir, bangsa-bangsa dunia relatif memiliki kesempatan longgar untuk merubah sejarah. Eksistensi PBB tidak perlu dipertentangkan dengan kehadiran berbagai organisasi regional. Keduanya dapat merumuskan bentuk-bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka manata dunia yang damai dan sejahtera.

Secara demikian, regionalisme tidak mengusur keharusan sejarah yang menghendaki kehadiran PBB sebagai manifestasi gagasan internasionalisme. Regionalisme lebih merupakan bagian dari tubuh internasionalisme yang berjuang menuju keberhasilan bersama. Membangun komunikasi yang produktif dan harmonis antara PBB dan berbagai organisasi regional mampu menjamin tergayuhnya prestasi internasional dan situasi dunia yang demokratis.

Memenuhi harapan ini, proses pen-delegasian tanggungjawab yang lebih besar kepada organisasi regional harus seiring dengan misi dan prakarsa PBB. Dengan kata lain, distribusi kerja antara keduanya perlu dirumuskan secara tegas tanpa mengurangi pertimbangan fleksibilitas atas dasar komitmen bersama, yakni memperjuangkan keamanan dan perdamaian internasional.

Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa ibarat rekaman perubahan, eksperimen, improvisasi, keberhasilan, kegagalan atau bahkan kekecewaan. Meski tak terpisah dari kritik yang terus mengalir, eksistensi PBB tetap diperlukan umat manusia. Badan Dunia ini merupakan forum yang paling berkompeten menampung aspirasi internasional dalam suasana yang dialogis. Perannya dalam mengawasi perdamaian merupakan unsur penting dalam menyelesaikan atau setidaknya meminimalisasikan konflik internal dalam sebuah negara, konflik regional yang melibatkan beberapa negara maupun konflik internasional yang mengancam kehidupan umat manusia pada umumnya. PBB juga memerankan diri sebagai organisasi diplomatik yang menjembatani antar pemerintah di seluruh dunia. Ia tidak saja menangani masalah konflik dan perdamaian, tetapi juga mengambil prakarsa dan berpartisipasi aktif dalam membangun ekonomi, sosial, pendidikan dan kemanusiaan secara global.

Bahkan, PBB tak jarang menjadi cermin dari berbagai kenyataan pahit yang melanda bumi. Relitas ini muncul karena perbedaan politik dan ideologi yang merebak di kalangan anggota-anggotanya. Selain merefleksikan derita dua per tiga umat manusia yang masih terbelenggu kemiskinan, PBB juga mencerminkan diskriminasi rasial, pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan. Plafon anggaran belanja yang disediakan untuk senjata tiga kali lebih besar dibanding anggaran untuk kesehatan. Bukan hanya gagasan-gagasan ideal

**Sejarah  
Perserikatan  
Bangsa-Bangsa  
ibarat  
rekaman  
perubahan,  
eksperimen,  
improvisasi,  
keberhasilan,  
kegagalan atau  
bahkan  
kekecewaan.**

yang dihadapi organisasi ini, namun ia juga bersikap realistis terhadap aneka ragam kenyataan dunia yang dimarakkan dengan sekian problema.

PBB didirikan sebagai sebuah kerangka global yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah dunia. Piagam yang dirumuskan organisasi ini menegaskan bahwa semua anggota masyarakat internasional memiliki hak dan suara untuk dide-ngar, tetapi juga kewajiban dan kontribusi kongkrit dalam mengatasi persoalan-persoalan mereka. Jika terdapat jarak yang lebar antara cita-cita dan kenyataan, tugas PBB adalah mempersempit jarak itu. Dalam kaitan inilah, PBB tidak menghendaki keyakinan berlebihan terhadap potensi, kapasitas dan kualitasnya. PBB justeru mengharapkan kritik atau bahkan "kutukan". Dengan catatan, kritik dan "kutukan" itu didasarkan pada pemahaman faktual tentang fungsi organisasi. Namun, karena PBB terdiri dari negara-negara anggota, kritik itu pada gilirannya juga tertuju pada masing-masing anggota.

Dalam konteks inilah, dikotomi antara PBB dan organisasi regional tak perlu dipertajam. Keduanya dapat menjalin kerjasama dalam bentuk saling berkonsultasi dan membangun konsensus tentang sifat persoalan dan tindakan yang dianggap perlu. Kerjasama yang produktif antara keduanya justeru mendorong negara-negara di luar PBB untuk ikut aktif membantu menyelesaikan masalah-masalah internasional. Jika secara khusus PBB melegalisir organisasi regional untuk menyelesaikan masalah di kawasan mereka, peran serta organisasi itu semakin mengukuhkan eksistensi PBB. Dengan semangat Piagam yang dirumuskan, interaksi timbal balik dan kerjasama harmonis antara PBB, organisasi regional dan semua anggota dalam menyelesaikan setiap masalah, merupakan indikator bahwa demokratisasi merupakan salah satu prioritas sasaran yang lebih menjamin keamanan dan perdamaian dunia.